

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang termasuk kedalam negara yang sedang berkembang, hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik negara yang sedang berkembang yaitu lebih memfokuskan kepada pembangunan ekonomi negaranya.¹ Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan aspek lain dalam perekonomian misalnya perkembangan kemahiran tenaga kerja, perkembangan teknologi, perkembangan pendidikan, dan meningkatnya kemakmuran pada masyarakat.² Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu pengukur atau indikator dalam menganalisa terkait ketepatan dalam menentukan kebijakan pembangunan suatu negara. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan sejauh mana aktivitas dalam sebuah perekonomian dalam suatu negara yang berpengaruh terhadap pendapatan pada masyarakat dalam suatu periode tertentu.³

Pertumbuhan ekonomi menjadi bagian yang selalu berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat sebagai salah satu indikator penting dalam sebuah keberhasilan pembangunan ekonomi.⁴ Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dengan menghitung kenaikan nilai pada produk domestik bruto (PDB) suatu negara tersebut. Produk domestik

¹ Dewi Ernita. dkk., *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia*" *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol 1 No. 2 (Januari 2013) Universitas Negeri Padang, h. 180.

² Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.423.

³ Michael Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi 11*, (Jakarta: Erlangga, 2020), h.135.

⁴ Vinna Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 158.

bruto (PDB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang di produksi oleh seluruh unit ekonomi pada suatu Negara dan pada periode tertentu.⁵ PDB dihitung dengan menjumlahkan keseluruhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada setiap provinsi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator pertumbuhan dan pembangunan suatu perekonomian daerah yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang berlaku. Harapan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, suatu daerah mampu membangun perekonomomian daerahnya meliputi pembangunan secara merata dan menyeluruh.⁶ Pembangunan ekonomi daerah sangat berperan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan ekonomi secara nasional. Setiap provinsi harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta memenuhi target yang direncanakan dalam perencanaan perekonomian sehingga permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi dapat diatasi.

Melihat pada pertumbuhan ekonomi secara nasional provinsi-provinsi pada wilayah Pulau Jawa kontribusi PDB secara nasional selalu mendominasi diantara provinsi-provinsi lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik kontribusi PDRB provinsi-provinsi pada Pulau Jawa mencapai 59 %, disusul provinsi-provinsi Pulau sumatera dengan 21,32 %.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa PDRB pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa sangat memengaruhi PDB secara nasional. Berikut ini merupakan pemaparan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 berdasarkan atas dasar harga konstan 2010:

⁵ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 110.

⁶ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 7.

⁷ Publikasi Badan Pusat Statistik, *PDB menurut Provinsi-Provinsi di Indonesia*, <https://www.bps.go.id/publication/2021/04/05/25490b92b3c257c016886b6b/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-lapangan-usaha-2016-2020.html>, diunduh pada 29 Maret 2022, pukul 13.00 WIB.

TABEL 1. 1

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Pada Wilayah Provinsi-Provinsi Pulau Jawa Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Provinsi	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2016	1.539.917	1.275.619	849.099	87.685	1.405.564	387.835
2017	1.635.359	1.343.662	893.750	92.300	1.482.300	410.137
2018	1.735.208	1.419.624	941.091	98.024	1.563.442	433.783
2019	1.836.198	1.491.576	991.913	104.488	1.649.768	456.741
2020	1.792.795	1.445.235	965.629	101.680	1.610.420	411.296
Rata-Rata	1.707.895	1.395.143	928.296	96.835	1.542.299	419.958

Sumber : BPS (2022)

Tabel 1.1 menyajikan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 di provinsi-provinsi wilayah Pulau Jawa tahun 2016-2020. Secara keseluruhan rata-rata PDRB Provinsi Banten nilainya menunjukkan lebih rendah dibandingkan PDRB pada Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta. Namun lebih tinggi di atas Provinsi DI Yogyakarta. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang memiliki nilai tertinggi diantara provinsi-provinsi lainnya dengan nilai PDRB sebesar Rp 1.707.895 Milyar Rupiah.

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dilihat pada laju pertumbuhan PDRB pada setiap tahunnya. Laju pertumbuhan PDRB dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$G_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

Keterangan :

G_t = Pertumbuhan PDRB tahun t (tahun tertentu)

$PDRB_t$ = PDRB periode t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB periode tahun sebelumnya

Adapun laju pertumbuhan PDRB pada provinsi di wilayah Pulau Jawa periode tahun 2016-2020. Dihitung berdasarkan rumus laju pertumbuhan PDRB sebagai berikut:

TABEL 1. 2

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Pada Wilayah Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 (Persen)

Provinsi	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2016	5,87%	5,66%	5,25%	5,05%	5,57%	5,28%
2017	6,20%	5,33%	5,26%	5,26%	5,46%	5,75%
2018	6,11%	5,65%	5,30%	6,20%	5,47%	5,77%
2019	5,82%	5,07%	5,40%	6,59%	5,52%	5,29%
2020	-2,36%	-3,11%	-2,65%	-2,69%	-2,39%	-9,95%
Rata-Rata	4,33%	3,72%	3,71%	4,08%	3,93%	2,43%

Sumber : BPS data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 yang disajikan yaitu laju pertumbuhan PDRB provinsi-provinsi pada wilayah Pulau Jawa tahun 2016-2020. Laju rata-rata pertumbuhan ekonomi pada Provinsi DKI Jakarta merupakan paling tinggi diantara provinsi-provinsi lainnya yaitu sebesar 4,33%, di ikuti provinsi DI Yogyakarta dengan 4,08%, Jawa Timur dengan 3,93%, Jawa Barat dengan 3,85% dan Jawa Tengah dengan 3,71%. Kemudian Provinsi Banten memiliki laju rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 2,43 persen, hal ini menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Banten merupakan paling rendah diantara provinsi lainnya, hal tersebut tidak selaras dengan letak geografis Provinsi Banten yang terbilang strategis, diantaranya merupakan provinsi yang bersampingan dengan Ibukota Negara (pusat perekonomian terbesar) dan menjadi provinsi penyangga Ibukota.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Pada perhitungan pendekatan pengeluaran yaitu dengan menghitung nilai total pengeluaran yang diperlukan untuk membeli output pada suatu daerah.

Total pengeluaran tersebut dibagi-bagi kedalam beberapa kategori diantaranya pengeluaran untuk barang-barang konsumsi, pengeluaran untuk penanaman modal (investasi), pengeluaran pemerintah daerah, dan ekspor bersih daerah (ekspor dikurangi impor).⁸ Investasi menjadi salah satu kategori dalam perhitungan pendekatan pengeluaran dan merupakan salah satu faktor pendorong dalam peningkatan pertumbuhan PDRB.⁹

Investasi merupakan penopang dalam keberlangsungan usaha sebagai penyedia barang produksi dan perlengkapan-perengkapan produksi. Di Indonesia pada umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu PMDN atau Penanaman Modal Dalam Negeri, dan PMA atau Penanaman Modal Asing.¹⁰ Berikut ini merupakan tabel realisasi investasi di Provinsi Banten pada periode tahun 2016-2020:

TABEL 1. 3

Realisasi Investasi dan Laju Realisasi Investasi di Provinsi Banten Periode Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Tahun	Total Investasi	Perubahan Investasi (%)
2016	52.321.561,87	15%
2017	55.825.682,54	7%
2018	56.523.045,79	1%
2019	48.719.379,00	-14%
2020	62.012.922,45	27%

Sumber : BPS (2022)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat realisasi investasi Provinsi Banten periode tahun 2016-2020 terlihat cenderung relatif terjadi peningkatan setiap tahunnya, walaupun di tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 14%. Tahun 2020 merupakan tahun tertinggi realisasi investasi

⁸ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.38.

⁹ Vinna Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 158.

¹⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 121.

yaitu sebesar Rp 62.012.922,45 Juta Rupiah dengan peningkatan sebesar 27% dari tahun sebelumnya.

Selain faktor investasi dalam menghitung PDRB dengan pendekatan pengeluaran, faktor lainnya dalam menghitung pendekatan pengeluaran adalah pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah atau Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.¹¹ Kebijakan pada belanja daerah yang tepat berdampak pada kesempatan kerja dan produktivitas. Selain itu, belanja daerah adalah sebuah bentuk rangsangan atau stimulus yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah.¹² Berikut ini merupakan data realisasi belanja daerah pada Provinsi Banten tahun 2016-2020 :

TABEL 1. 4

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja daerah	Perubahan Realisasi Belanja Daerah(%)
2016	9.786.470.314	5,90%
2017	10.265.222.255	4,89%
2018	11.072.775.454	7,87%
2019	12.281.829.272	10,92%
2020	13.264.391.206	8,00%

Sumber : BPS data diolah (2022)

Berdasarkan padatabel 1.4, realisasi belanja daerah Provinsi Banten yang terjadi pada periode tahun 2016-2020 terlihat terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Tahun 2019 merupakan presentasi perubahan tertinggi yang terjadi dengan presentasi perubahan

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No 33 Tahun 2004.

¹² Eko Wicaksono, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-faktor yang mempengaruhi (Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*, Jurnal Of Economics, Vol 2 No. 2 (Mei-Agustus 2013), Universitas Diponegoro, h. 35-45.

sebesar 10,92%. Diharapkan dengan terus bertambahnya belanja daerah pada Provinsi Banten dan distribusi yang tepat, dapat memicu tumbuhnya PDRB Provinsi Banten.

Selain investasi dan belanja daerah, faktor lainnya yang memiliki hubungan dengan PDRB adalah upah minimum. Upah minimum merupakan faktor dalam perhitungan PDRB dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan merupakan pendapatan daerah dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai bentuk balas jasa yang mereka terima, pendapatan tersebut terdiri dari empat faktor yaitu upah, sewa, bunga, dan laba. Upah merupakan hak yang diberikan kepada pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada para pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan tunjangan kerluarga atas suatu pekerjaan atau jasa yang akan dilakukan atau telah dilakukan.¹³ Upah pada setiap pekerja dalam suatu wilayah bisa dilihat pada upah minimum yang telah ditetapkan pada setiap daerah atau upah minimum Kabupaten/Kota. Upah minimum Kabupaten/Kota merupakan upah terendah yang diberikan setiap bulan yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, yang menjadi standar minimum para pengusaha atau pemberi kerja dalam memberi upah pekerjanya.¹⁴

Hubungan antara upah minimum dengan PDRB adalah upah dapat mendorong tingkat kesejahteraan pekerja sehingga bisa berdampak pada meningkatnya produktivitas dan output yang dihasilkan. Kemudian peningkatan produktivitas dan output dapat mempengaruhi nilai pada

¹³ Republik Indonesia, Undang-undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Menteri ketenagakerjaan Tahun 2013 Tentang Upah Minimum

PDRB. Berikut ini merupakan uraian upah minimum pada Provinsi Banten tahun 2016-2020:

TABEL 1. 5

Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Tahun	Upah Minimum
2016	1.784.000
2017	1.931.180
2018	2.099.385
2019	2.267.990
2020	2.460.996

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan pada tabel 1.5 menunjukkan upah minimum provinsi Banten pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 merupakan upah minimum dengan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp. 2.460.996. Kenaikan pada upah minimum diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan pekerja dan meningkatkan PDRB yang dihasilkan.

Hubungan atau keterkaitan dari ketiga faktor di atas yaitu investasi, belanja daerah, dan upah minimum terhadap PDRB perlu dibuktikan dengan adanya sebuah penelitian. Penulis menggunakan metode analisis regresi data panel dengan harapan dapat membantu mengetahui apakah ketiga faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki pengaruh terhadap PDRB. Kemudian penulis mengambil sampel penelitian yaitu di Kabupaten/Kota Provinsi Banten, penulis berusaha untuk mengetahui mengenai ketiga faktor yang memiliki hubungan dengan PDRB yang sudah dijelaskan di atas, apakah memiliki pengaruh terhadap PDRB di Provinsi Banten. Sehingga, penulis memilih judul pada penelitian ini yaitu: **"Analisis Pengaruh Investasi, Belanja Daerah dan Upah Minimum Terhadap Produk Domestik Regional**

Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2016-2020”

B. Identifikasi Masalah

Dari pembahasan latar belakang masalah di atas, dapat di ambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode tahun 2016-2020 memiliki nilai yang rendah, yaitu terendah kedua dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa lainnya.
2. Rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode tahun 2016-2020 memiliki rata-rata terendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi di wilayah Pulau Jawa.
3. Secara geografis Provinsi Banten adalah provinsi yang strategis karena bersampingan dengan Ibukota Negara Indonesia dan menjadi provinsi penyangga Ibukota Negara. Namun tidak selaras dengan nilai PDRB Provinsi Banten tahun 2016-2020 yang memiliki nilai terendah kedua dan nilai laju PDRB Provinsi Banten tahun 2016-2020 yang memiliki nilai terendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di wilayah Pulau Jawa.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, penulis mengambil batasan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Variabel investasi, belanja daerah, dan upah minimum Provinsi Banten sebagai variabel bebas atau independen (X), sedangkan PDRB Provinsi Banten merupakan variabel terikat atau dependen (Y)
2. Penelitian hanya dilakukan pada periode tahun 2016-2020

3. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh investasi, belanja daerah dan upah minimum terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2016-2020.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, masalah utama yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap PDRB secara parsial pada Provinsi Banten Tahun 2016-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap PDRB secara parsial pada Provinsi Banten tahun 2016-2020 ?
3. Bagaimana Pengaruh upah minimum terhadap PDRB secara parsial pada Provinsi Banten tahun 2016-2020 ?
4. Bagaimana pengaruh investasi, belanja daerah, dan upah minimum terhadap PDRB secara simultan pada Provinsi Banten tahun 2016-2020 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, adapun tujuan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh investasi (X_1) secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) pada Provinsi Banten tahun 2016-2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah (X_2) secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) pada Provinsi Banten tahun 2016-2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum (X_3) secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) pada Provinsi Banten tahun 2016-2020.

4. Untuk menganalisis pengaruh Investasi, Belanja Daerah dan Upah Minimum (X_1 , X_2 dan X_3) secara bersamaan (simultan) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) pada Provinsi Banten tahun 2016-2020.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Lembaga Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Banten dalam menyusun kebijakan terkait dengan kebijakan investasi, belanja daerah, dan upah minimum yang mempengaruhi PDRB.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah ilmiah para pembaca dibidang akademik, serta menambahkan rujukan sebagai referensi pembaca yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh investasi, belanja daerah, dan upah minimum terhadap PDRB.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar dan memperluas ilmu pengetahuan terkait permasalahan pada suatu daerah, khususnya menyangkut investasi, belanja daerah, upah minimum dan PDRB.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai suatu sumber untuk dijadikan acuan penulis dalam melakukan penelitian. pada penelitian ini penelitian terdahulu yang digunakan berasal dari berbagai jurnal dan penelitian berbentuk skripsi. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian:

TABEL 1. 6**Penelitian-Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Yois Nelsari Malau, Lilyana Loren, Catherin, dan Selvia Hendrawan (2020) Pengaruh Investasi Tenaga Kerja dan Ekspor Terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019. ¹⁵	Investasi, Tenaga Kerja, dan Ekspor Berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera periode 2017-2019	Kesamaan pada variabel dependen yaitu PDRB dan variabel independen yaitu investasi. Menggunakan metode penelitian model regresi linier berganda	Perbedaan pada lokasi dan periode tahun pada penelitian, Perbedaan pada variable X, hanya variabel X investasi yang sama
2.	Ainur Rofiq (2020) Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. ¹⁶	Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja berengaruh secara signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur Tahun	Kesamaan pada variabel dependen yaitu PDRB dan variabel independen yaitu pengeluaran	Perbedaan pada lokasi dan periode tahun penelitian, Perbedaan pada variabel X, hanya variabel X pengeluaran

¹⁵ Yois Nelsari. Dkk., *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Ekspor Terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol 4 No. 3 (Maret-Mei 2020), Universitas Prima Indonesia, h. 1711-1724.

¹⁶ Ainur Rofiq, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018*, Skripsi 2020, Universitas Wijaya Kusuma.

		2014-2018	pemerintah Menggunakan metode penelitian model regresi linier berganda	pemerintah yang sama
3.	Mamai Maisaroh dan Havid Risyanto (2018), Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Banten. ¹⁷	Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Banten	Kesamaan pada variabel dependen yaitu PDRB dan variabel independen yaitu investasi dan pengeluaran pemerintah Menggunakan metode penelitian model regresi linier berganda	Perbedaan pada tahun penelitian, Perbedaan pada variable X, hanya variabel X investasi dan pengeluaran pemerintah yang sama
4.	Latifa Insaf Maulida dan Idah Zuhroh	Pengeluaran Pemerintah	Kesamaan pada variabel	Perbedaan pada lokasi penelitian,

¹⁷ Mamai Maisaroh dan Havid Risyanto, *Pengaruh Investasi, pengeluaran Pemerintah, dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Banten*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 1 No. 2 2020, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 206-221.

	(2017) . Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Pada Koridor Utara Selatan di Provinsi Jawa Timur. ¹⁸	berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB Pada Koridor Utara Selatan di Provinsi Jawa Timur.	dependen yaitu PDRB dan variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah	Perbedaan pada variable X, hanya variabel X pengeluaran pemerintah yang sama
5.	Rahmawati (2019). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. ¹⁹	Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	Kesamaan pada variabel dependen yaitu PDRB dan variabel independen yaitu belanja daerah	Perbedaan pada lokasi penelitian, Perbedaan pada variable X, hanya variabel X pengeluaran pemerintah yang sama
6.	Alby Anzalia Siregar (2019) Analisis Pengaruh Ekspor, Tenaga Kerja, dan Investasi Terhadap PDRB di Sumatera	Ekspor, Tenaga Kerja dan Investasi memiliki pengaruh signifikan	Kesamaan pada variabel deopenden yaitu PDRB dan variabel independen	Perbedaan pada lokasi dan periode tahun pada penelitian, Perbedaan pada

¹⁸ Latifa Insaf Maulida dan Idah Zuhroh, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Pada Koridor Utara Selatan di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 No. 3 2017, Universitas Muhamadiyah Malang, h. 365-373.

¹⁹ Rahmawati, *Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 No. 3 2017, Universitas Muhamadiyah Malang, h. 365-373.

	Utara Tahun 2000-2017. ²⁰	terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara	yaitu investasi Menggunakan metode penelitian model regresi linier berganda	variable X, hanya variabel X investasi yang sama
--	--------------------------------------	--	--	--

H. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan pembahasan sebelumnya, PDB dapat dihitung dengan tiga pendekatan diantaranya yaitu pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan produksi. Sama halnya dalam menghitung PDRB pada setiap daerah dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan yang sama.

Pada perhitungan pendekatan pengeluaran terdapat empat faktor yang mempengaruhinya diantaranya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor. Investasi (X1) memiliki keterkaitan dengan PDRB yaitu investasi adalah faktor dalam menghitung PDRB menggunakan pendekatan pengeluaran. Secara teori investasi dapat menciptakan modal baru dan meningkatkan stok modal barang sehingga dapat menambah output yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan, selain itu investasi yang terjadi akan berdampak pada memperluasnya lapangan pekerjaan sehingga terserapnya banyak tenaga kerja. Bertambahnya output yang dihasilkan dan penyerapan tenaga kerja yang banyak memiliki hubungan dengan tumbuhnya perekonomian suatu daerah atau terjadi peningkatan PDRB di suatu daerah tersebut. Sama halnya pada Belanja daerah (X2) merupakan faktor dalam menghitung

²⁰ Alby Anzalia S., *Analisis pengaruh Ekspor, Tenaga Kerja, dan Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Sumatera Utara Tahun 2000-2017*, Skripsi 2019, UIN Sumatera Utara.

PDRB dengan pendekatan pengeluaran. Belanja pemerintah yang dikeluarkan melalui program-program yang tepat misalnya pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan lain-lain dapat meningkatkan tumbuhnya ekonomi dan meningkatnya PDRB di suatu daerah tersebut.

Dalam menghitung PDRB, selain dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, PDRB dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan terdapat empat faktor yang mempengaruhinya diantaranya upah, sewa, bunga, dan laba. Upah minimum (X_3) memiliki keterkaitan dengan PDRB karena salah satu faktor dalam menghitung PDRB menggunakan pendekatan pendapatan. Upah minimum merupakan upah minimal yang harus dibayarkan penyedia pekerjaan atau perusahaan kepada para pekerjanya, meningkatnya upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatnya konsumsi yang terjadi di masyarakat atau semakin bertambah perputaran uang yang terjadi di masyarakat, sehingga meningkatnya upah minimum dapat meningkatkan tumbuhnya ekonomi dan meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) di suatu daerah tersebut. Ketiga variabel yaitu investasi (X_1), belanja daerah (X_2) dan upah minimum (X_3) memiliki keterkaitan dengan variabel produk domestik regional bruto PDRB (Y). Sehingga kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 1. 1

Kerangka Pemikiran



I. Hipotesis

Dengan acuan pada rumusan masalah di atas, penulis menentukan hipotesis pada penelitian ini yaitu:

1. Investasi (X_1)
 - a. H_0 : diduga tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari investasi terhadap PDRB Provinsi Banten pada tahun 2016-2020.
 - b. H_1 : diduga terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari investasi terhadap PDRB Provinsi Banten pada tahun 2016-2020.
2. Belanja Daerah (X_2)
 - a. H_0 : diduga tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari belanja daerah terhadap PDRB Provinsi Banten pada tahun 2016-2020.
 - b. H_1 : diduga terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari belanja daerah terhadap PDRB Provinsi Banten pada tahun 2016-2020.
3. Upah Minimum (X_3)
 - a. H_0 : diduga tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari upah minimum terhadap PDRB Provinsi Banten pada tahun 2016-2020.
 - b. H_1 : diduga terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari upah minimum terhadap PDRB Provinsi Banten pada tahun 2016-2020.
4. PDRB Provinsi Banten (Y)

- a. H₀ : diduga tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan
dari investasi, belanja daerah dan upah minimum terhadap PDRB Provinsi Banten pada tahun 2016-2020.
- b. H₁ : diduga terdapat pengaruh signifikan secara simultan dari
investasi, belanja daerah dan upah minimum terhadap PDRB Provinsi Banten pada tahun 2016-2020.

J. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian jenis kuantitatif karena pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif atau dalam bentuk angka.²¹ Kabupaten/Kota di Provinsi Banten merupakan sampel yang diambil dalam penelitian ini. Sampel yang dalam bentuk publikasi yang dikeluarkan BPS. Analisis yang digunakan adalah analisis ekonometrika dengan metode analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari investasi, belanja daerah dan upah minimum terhadap PDRB. Pada Penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder yang berbentuk data panel yaitu data *cross section* dan data *time series* dengan data panel yang digunakan adalah 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020.

K. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian dalam penelitian ini yaitu terdiri dari lima bab dengan sub-bab pada setiap bab, setiap bab saling memiliki hubungan

²¹ Husna Hermawan, Asep. Yusran Laela, *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Desindo Putra Mandiri, 2017), h. 5.

satu sama lain. adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi pemaparan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Teoritis

Bab II merupakan pemaparan tinjauan pustaka yang membahas dasar teori yang berkaitan dengan topik penelitian diantaranya pembahasan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB, investasi, belanja daerah, dan upah minimum. kemudian berisi hubungan antar variabel yang memaparkan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat diantaranya hubungan investasi dengan PDRB, hubungan belanja daerah dengan PDRB, dan hubungan upah minimum dengan PDRB.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab III merupakan uraian pembahasan rinci terkait waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV merupakan uraian hasil penelitian yang sudah dilakukan dan pembahasan hasil penelitian yang dibahas secara analitis dan terpadu

Bab V

Bab V merupakan kesimpulan dan saran dengan uraian kesimpulan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta saran bagi penelitian selanjutnya.